

PEMERATAAN DAN KEADILAN EKONOMI DI INDONESIA (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)

Darwis Amin

Ekonomi Syariah IAIN Ambon

Email: darwis.amin@iainambon.ac.id

Abstracts

This study aims to understand the equitable distribution of the economy in Indonesia and to look at the Islamic economic perspective on economic justice in the context of economic equality in Indonesia. This type of research is library research with analysis tools using the Gini coefficient, Theil index, L index and the World Bank. The results of the study show (1) There is still inequality in the distribution of the economy in Indonesia because there is a significant increase in the wealth of capital owners, while workers only have capital in the form of labor and skills. (2) In the context of economic equality in Indonesia, the Islamic perspective puts forward the concept of economic distribution that covers the entire Indonesian economic system with the principle of economic justice according to Islamic teachings.

Keyword: *economic equity, economic justice, gini ratio, Theil index, L index*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami distribusi ekonomi yang merata di Indonesia serta melihat perspektif ekonomi Islam mengenai keadilan ekonomi dalam konteks pemerataan ekonomi di Indonesia. Jenis penelitian merupakan penelitian kepustakaan dengan alat analisis menggunakan koefisien gini, indeks Theil, indeks L serta Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukkan (1) Masih terjadi ketimpangan dalam pendistribusian ekonomi di Indonesia karena terdapat peningkatan yang signifikan dalam kekayaan pemilik modal, sedangkan pekerja hanya memiliki modal berupa tenaga kerja dan keterampilan. (2) Dalam konteks pemerataan ekonomi di Indonesia, perspektif Islam mengemukakan konsep distribusi ekonomi yang mencakup seluruh sistem ekonomi Indonesia dengan prinsip keadilan ekonomi menurut ajaran Islam.

Kata Kunci: *pemeratakaan ekonomi, keadilan ekonomi, gini rasio, indeks Theil, indeks L*

PENDAHULUAN

Pentingnya pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan standar hidup masyarakat, pemerintah giat melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, termasuk usaha untuk mengembangkan aktivitas ekonomi, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sehingga hasil pembangunan harus dirasakan oleh semua masyarakat secara adil dan merata, baik secara fisik maupun emosional.

Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam pembangunan ekonomi selama beberapa dekade terakhir, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2003-2022.



Sumber: Diolah dari data Susenas

Catatan: - Tahun 2005 berdasarkan data Februari

- Tahun 2006-2022 berdasarkan data Maret

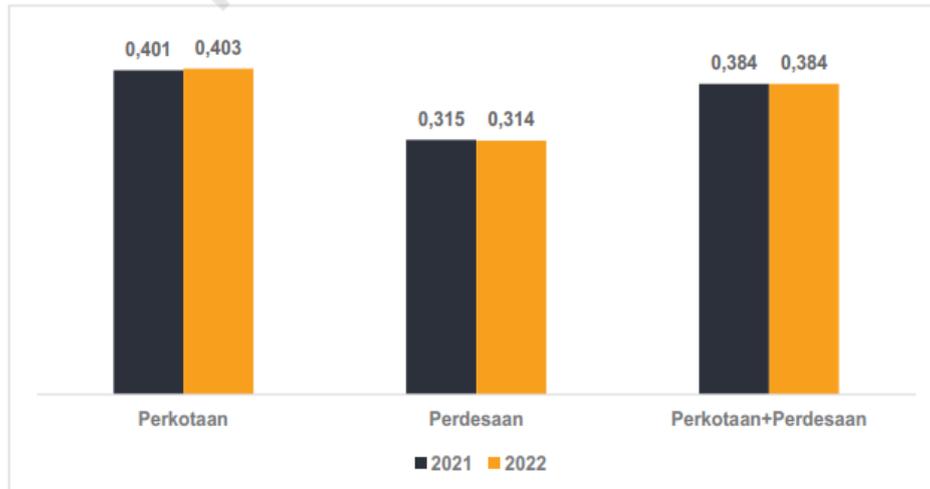
Pada periode 2003-2022, tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik secara jumlah maupun persentase. Selama periode tersebut, penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan relatif lebih cepat dibanding di perkotaan.

Dalam hal distribusi pendapatan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur kemiskinan relatif, penggunaan data pendapatan sulit dilakukan, sehingga pengukuran distribusi pendapatan dilakukan melalui pendekatan menggunakan data pengeluaran. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan ketidakmerataan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). indeks Theil dan indeks-L serta ukuran Bank Dunia.

Gini Ratio adalah sebuah metrik yang sering digunakan di berbagai negara untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk. Perubahan Gini Ratio menunjukkan perubahan dalam distribusi pengeluaran penduduk. Pada Maret 2022, angka Gini Ratio tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi Maret 2021 yang sebesar 0,384. Jika dilihat menurut daerah, dibandingkan kondisi Maret 2021, Gini Ratio di daerah perkotaan naik sebesar 0,002 poin, sedangkan di perdesaan turun 0,001 poin

Gambar 2.

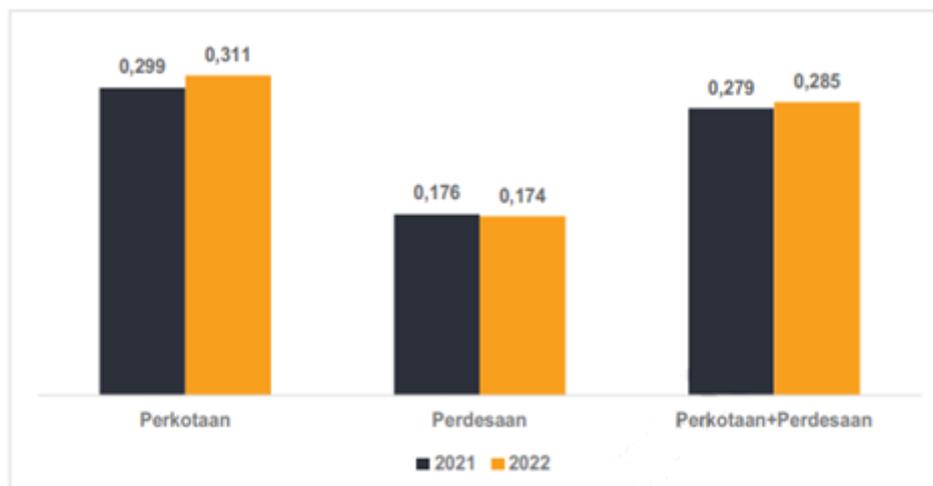
Gini Ratio di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022.



Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2021 dan Maret 2022

Gambar 3.

Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022.

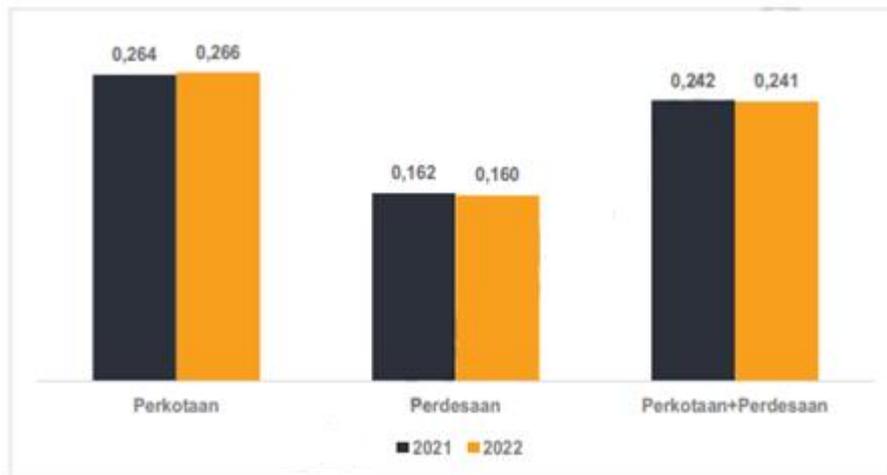


Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2021 dan Maret 2022

Ada juga sebuah indikator ketimpangan pengeluaran yang dikenal sebagai Indeks-L. Indeks ini lebih responsif dalam mengamati perubahan distribusi pengeluaran penduduk di kalangan kelompok dengan pendapatan yang lebih rendah. Selama setahun terakhir (kondisi Maret 2021 - Maret 2022), Indeks-L turun dari 0,242 menjadi 0,241. Pola yang sama juga terlihat di daerah pedesaan, sedangkan di perkotaan Indeks-L mengalami peningkatan.

Gambar 4.

Indeks L di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022.



Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2021 dan Maret 2022

Indikator lain untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk terfokus pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran paling rendah. Tingkat ketimpangan ini mencerminkan bagian dari total pengeluaran penduduk yang berasal dari kelompok pengeluaran tersebut, dengan penggolongan tingkat ketimpangan pengeluaran yang terbagi seperti berikut:

- a. Jika bagian pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen, maka itu diklasifikasikan sebagai tingkat ketimpangan pengeluaran yang tinggi (*highly inequality*).
- b. Jika bagian pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada antara 12 persen hingga 17 persen, maka itu diklasifikasikan sebagai tingkat ketimpangan pengeluaran yang sedang (*moderate inequality*).
- c. Jika bagian pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah lebih dari 17 persen, maka itu diklasifikasikan sebagai tingkat ketimpangan pengeluaran yang rendah (*low inequality*).¹

Jika dilihat perkembangannya, ketimpangan pengeluaran di perkotaan pada

¹ BPS. 2022. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022. BPS. Jakarta. Hal. 25.

periode 2012-2022 termasuk dalam kategori sedang. Sementara daerah pedesaan mulai pada periode 2012-2021 dikategorikan pada ketimpangan rendah. Jika dibandingkan menurut wilayah, pada periode 2012-2021, perkotaan memiliki ketimpangan lebih tinggi dibandingkan pedesaan.

Gambar 5.

Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2021 – Maret 2022.



Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2021 dan Maret 2022

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Namun, perkiraan menunjukkan bahwa penurunan tersebut akan melambat di masa mendatang. Mereka yang berhasil keluar dari kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir umumnya berada pada ujung garis kemiskinan, yang berarti mereka tidak memerlukan dukungan yang kuat untuk keluar dari kondisi tersebut. Namun, seiring berkurangnya jumlah kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinan menjadi fokus utama untuk mendapatkan bantuan dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Hal ini menjadi lebih kompleks dan dapat mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan yang berlangsung lebih lambat daripada sebelumnya. Stabilitas harga makanan, terutama beras, sangat penting bagi Indonesia karena sebagian besar penduduk menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk membeli beras dan produk makanan lainnya. Oleh karena itu, tekanan inflasi pada harga beras, misalnya akibat gagal panen, dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau berada di ambang kemiskinan. Bahkan mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat

terjerumus ke dalam kemiskinan akut akibat inflasi yang tinggi. Selain inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga makanan, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi, terutama subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, juga berkontribusi pada tingkat inflasi yang tinggi.

Dampak negatif yang timbul mendorong kita untuk terus meningkatkan kewaspadaan, ketahanan, dan kesiapan ekonomi kita dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, faktor eksternal lain seperti fluktuasi harga minyak, potensi konflik dagang antara Amerika dan Tiongkok, serta situasi geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea juga harus terus dipantau dengan cermat.²

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, pemerintah Indonesia telah melakukan pengurangan anggaran subsidi untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan peningkatan sumber daya manusia sebagai langkah untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, pemerintah telah menjalankan tiga pilar utama, yaitu reforma agraria, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta menciptakan lapangan kerja.³

Fenomena yang terlihat saat ini adalah adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara berkembang yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Dengan melihat realitas tersebut, jelas terdapat kesalahan dalam konsep-konsep yang selama ini diterapkan di berbagai negara, karena masih jauh dari harapan yang diinginkan. Fakta ini terbukti dengan ketidakmampuan mencapai tujuan-tujuan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja penuh, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.⁴

Dalam kaitannya dengan Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah dasar keyakinan dalam agama Islam. Konsep ini menyatakan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini direncanakan dan

² Sri Mulyani, (Menteri Keuangan RI), Pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia Pengantar dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2019. Di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta, 18 Mei 2018), h. 4.

³ Republika.2017. Ini Cara Pemerintah Wujudkan Pemerataan Ekonomi. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/17/oxz2bd415-ini-cara-pemerintah-wujudkan-pemerataan-ekonomi?>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023, pukul 10.40 WIT.

⁴ At-Tariqy Husein Abdullah Abdul, Al-Iqtishad Al-Islami, Ushuluhi wa Mubaun wa Ahdaf, Dar An-Nafais, (Kuwait, 1999), h. 276.

- diciptakan oleh Allah SWT secara sengaja, bukan hasil kebetulan, dan setiap hal memiliki tujuan yang pasti. Tujuan ini memberikan makna dan signifikansi pada keberadaan alam semesta, termasuk manusia yang merupakan salah satu makhluk yang mendiaminya.
2. Prinsip khilafah. Manusia merupakan khalifah Allah SWT di dunia ini, yang diberikan dengan sumber daya fisik dan spiritual untuk dapat memainkan peran yang efektif sebagai wakil-Nya. Prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting, antara lain: (1) adanya persaudaraan universal antara manusia, (2) pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah yang harus dijaga, (3) mengadopsi gaya hidup sederhana dalam menjalani kehidupan, dan (4) pemberian kebebasan kepada manusia untuk berbuat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
 3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu misi utama ajaran Islam, yang memiliki beberapa implikasi penting, antara lain: (1) pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok manusia agar dapat hidup layak, (2) sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan harus halal dan tayyib (baik dan bersih), (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata agar tidak terjadi ketimpangan yang berlebihan, dan (4) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.⁵

Upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai pemerataan pendapatan dan kesejahteraan yang selama ini masih belum berhasil memenuhi harapan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, menjadi hal yang penting. Distribusi pendapatan yang tepat dan merata menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Jika distribusi pendapatan tidak dilakukan secara adil, maka kemungkinan besar sebagian besar pendapatan dan sumber daya akan dikendalikan oleh para kapitalis yang monopolis. Akibatnya, banyak masyarakat tetap berada dalam kondisi kemiskinan, meskipun negara memiliki sumber daya yang melimpah. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem pendistribusian yang adil agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat tercapai.⁶

⁵ Umer Chapra. 2007. *Islam and The Economic Challenge* diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, Hal. 7.

⁶ Rahmat Taufik. 2011. *Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Hal. 17.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mencapai stabilitas sosial dalam masyarakat. Ketika terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin membesar antara kelompok mayoritas dan minoritas, dapat menimbulkan gejolak sosial yang serius. Oleh karena itu, penting untuk segera mewujudkan pemerataan ekonomi agar masalah ini dapat diselesaikan. Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perekonomian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, dan tugas ini tidak hanya terbatas pada upaya memberantas kemiskinan melalui bantuan dana. Lebih dari itu, permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan sarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang saat ini mulai memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Meskipun peran pemerintah dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi semakin terbatas, penting juga untuk menyadari bahwa sektor swasta juga memiliki peran yang penting dalam mencapai pemerataan ekonomi yang diinginkan.

Dalam konteks ekonomi, distribusi secara sederhana mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Penting untuk melakukan aktivitas distribusi dengan benar dan secara tepat agar barang, jasa, atau pendapatan yang dihasilkan oleh produsen dapat mencapai konsumen yang membutuhkannya. Tujuan utama dalam pendistribusian yang adil adalah mengurangi kesenjangan antara masyarakat. Disparitas pendapatan dalam masyarakat adalah fenomena yang alami dan tidak dapat dihindari.

Namun, ketidakadilan pendapatan menjadi tidak adil ketika sebagian kecil masyarakat hidup dalam kemewahan yang berlebihan, sementara mayoritas masyarakat hidup di bawah tingkat kemiskinan.⁷ Islam mengakui adanya variasi dalam kepemilikan kekayaan dalam batas yang wajar, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan keterampilan dan memanfaatkan sifat-sifat mulia mereka secara optimal melalui usaha yang berkelanjutan. Namun, ketidakadilan terjadi ketika perbedaan dalam kepemilikan harta melampaui batas yang wajar, dan hal ini dapat menjadi awal kehancuran bagi suatu masyarakat dan bangsa. Pembatasan atas kekayaan pribadi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli atas kapital dan sumber daya produktif yang hanya berada di tangan kelompok tertentu.

⁷ Ace Partadiredja. 1992. Pengantar Ekonomika. Yogyakarta. BPFE. Hal. 18.

B. Pemerataan Ekonomi Perspektif Islam

Keseimbangan antara orientasi duniawiyah (materi) dan ukhrawiyah (kepuasan non-materi) diidamkan dalam Islam. Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang abadi. Keadilan sosial merupakan elemen penting dalam dinamika sosial menurut pandangan Islam. Dalam konteks perekonomian yang sedang berkembang, pertumbuhan pendapatan nasional dapat ditingkatkan dengan tujuan agar setiap individu dapat menerima bagian yang adil dari pertumbuhan tersebut.

Islam memiliki pandangan yang tidak menginginkan adanya ketimpangan ekonomi yang berlebihan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketimpangan tersebut dapat memicu kebencian, permusuhan, dan konflik yang merusak pondasi masyarakat. Ketika ketidakseimbangan ekonomi menjadi kecenderungan yang tidak wajar dan orang-orang miskin menjadi terjajah oleh orang-orang kaya yang berkuasa, hal ini menjadi tanda-tanda kemunduran bagi masyarakat tersebut.

Islam tidak akan membiarkan situasi seperti itu terus berkembang. Oleh karena itu, Islam mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah ketimpangan ekonomi agar tidak melampaui batas-batas yang wajar dan alami. Kondisi seperti itu dapat terwujud dalam masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam perjuangan hidup mereka, serta memungkinkan setiap individu untuk mengoptimalkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka dalam upaya mencapai posisi yang lebih baik dalam masyarakat.

Islam mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menjamin dan menjaga kondisi dan kebutuhan manusia, sehingga terjadi distribusi kekayaan yang adil. Tidak ada pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak individu. Tidak ada individu yang diperbolehkan mengumpulkan kekayaan melebihi batas yang wajar, dan tidak ada yang dibiarkan kelaparan. Semua orang diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan, tanggung jawab, dan kebutuhan ekonomi mereka. Dengan kata lain, Islam tidak menganjurkan kesetaraan semu dalam kepemilikan dan pencarian kekayaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam memperoleh kekayaan, yang pada gilirannya dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada manusia selama mereka menggunakan sumber daya mereka secara sah. Islam hanya menginginkan keadilan bagi semua orang dalam upaya mencapai kekayaan. Untuk mencapai tujuan ini, Islam menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi individu serta menerapkan aturan hukum yang diperlukan. Ini adalah prinsip keadilan dalam Islam untuk menghapuskan ketimpangan kekayaan yang berlebihan secara permanen.

Menurut Muhammad Qal'ah Jey dalam buku *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy* “salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi”.⁸ Tetapi dalam hal ini terdapat sebuah pertanyaan besar, yaitu apakah yang menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi, apakah pemerataan (*growth with equity*) atau pertumbuhan itu sendiri (*growth an sich*). Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa Islam memandang kedua aspek tersebut memiliki kepentingan yang sama. Baik pertumbuhan maupun pemerataan, keduanya dibutuhkan secara bersamaan dan sejalan.

Dalam ekonomi Islam, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan yang optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani. Islam melarang konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksa manusia untuk mengorbankan hal-hal yang tidak alamiah. Dalam pandangan Islam, tingkat pertumbuhan yang rendah namun disertai dengan distribusi pendapatan yang merata dianggap lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan distribusi yang merata. Namun, yang diinginkan secara ideal adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksa manusia mengorbankan hal-hal yang tidak alamiah, dan sekaligus diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah menggunakan indeks Gini. Indeks Gini ini memperhatikan distribusi pendapatan di seluruh lapisan masyarakat. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, dan memiliki kategori sebagai berikut:

1. Jika indeks Gini = 0, itu berarti pendapatan didistribusikan secara merata, sehingga setiap individu menerima jumlah pendapatan yang sama.
2. Jika indeks Gini = 1, itu menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang ekstrem atau pendapatan yang hanya diterima oleh satu orang atau kelompok tertentu.⁹

⁸ Muhammad Qal'ah Jey, *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy*, Dar An-Nafais, Kuwait, Hal. 35.

⁹ Lestari Aguslim.2016. *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia*. Artikel Publish Kinerja, Vol. 20 No. 1. Hal. 53-68.

Tabel 1.
Tingkat Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini

Indeks Gini	Keterangan
≥ 0.80	ketimpangan sangat tinggi
0.60-0.79	ketimpangan tinggi
0.40-59	ketimpangan sedang
0.20-0.39	ketimpangan rendah
<0.20	ketimpangan sangat rendah

Selain itu aspek kemiskinan perlu dilihat dalam pendistribusian pendapatan. Dalam konteks pengukuran distribusi pendapatan, ketika data pendapatan sulit diperoleh, pendekatan alternatif yang sering digunakan adalah dalam menggunakan data pengeluaran, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan memanfaatkan data pengeluaran total rumah tangga sebagai pendekatan untuk menggambarkan tingkat pendapatan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan ketidakmerataan pendapatan adalah koefisien Gini, juga dikenal sebagai Gini Ratio.

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan di antara individu-individu dalam suatu populasi atau masyarakat. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang sempurna merata (tanpa ada ketimpangan), sedangkan nilai 1 mengindikasikan ketimpangan yang maksimum (salah satu individu memiliki seluruh pendapatan).

Dalam analisis distribusi pendapatan dengan menggunakan koefisien Gini, semakin tinggi nilai koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin merata distribusi pendapatan di antara individu-individu dalam masyarakat.

Penggunaan koefisien Gini dalam analisis distribusi pendapatan dengan menggunakan data pengeluaran dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketimpangan pendapatan di suatu negara atau wilayah. Dengan demikian, koefisien Gini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan dalam analisis distribusi pendapatan serta indikator lainnya seperti indeks Theil, indeks-L, dan ukuran Bank Dunia.

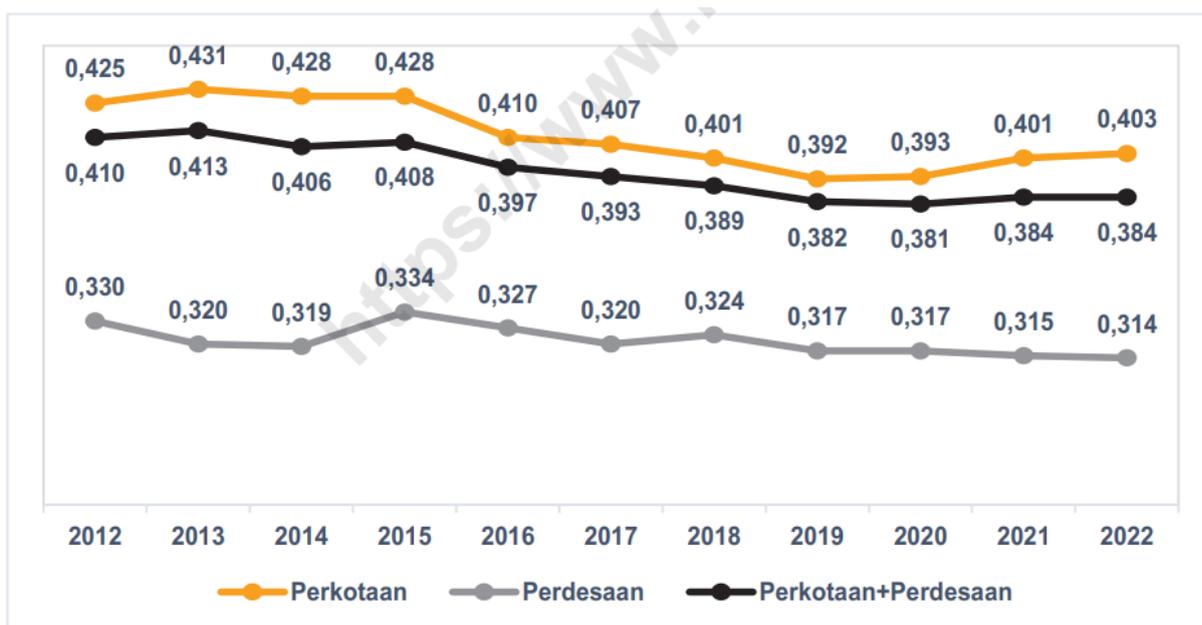
Pada tahun 2013, 2015, dan 2021, Gini Ratio mengalami peningkatan. Hal ini

mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut memburuk. Sementara itu, sejak tahun 2016 hingga 2020, Gini Ratio terus menurun, yang berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Namun, karena adanya dampak pandemi COVID-19, Gini Ratio mengalami peningkatan menjadi 0,384 pada tahun 2021 dan 2022.

Jika dilihat menurut daerah, pada periode 2012-2013, Gini Ratio di perkotaan mengalami peningkatan dan mulai mengalami penurunan sejak tahun 2014 hingga 2019. Namun, pada 2020 hingga 2022 meningkat kembali. Sementara itu, pola berbeda terjadi di pedesaan. Pada periode 2012-2014, Gini Ratio pedesaan mengalami penurunan, dan meningkat pada tahun 2015 dan 2018. Selanjutnya pada periode 2019-2022 terus mengalami penurunan.

Gambar 6.

Gini Ratio di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2012-2022.



Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Konsumsi Pengeluaran Tahun 2012-2022 (Kondisi Maret)

Pola serupa juga terjadi di daerah perkotaan, sedangkan di pedesaan mengalami penurunan. Sejak tahun 2012 hingga 2022, indeks Theil cenderung menurun, meskipun sempat meningkat pada tahun 2015, 2021, dan 2022. Jika dilihat menurut daerah, pola yang berbeda terlihat di pedesaan di mana sejak tahun 2018 hingga 2022 justru terus menurun.

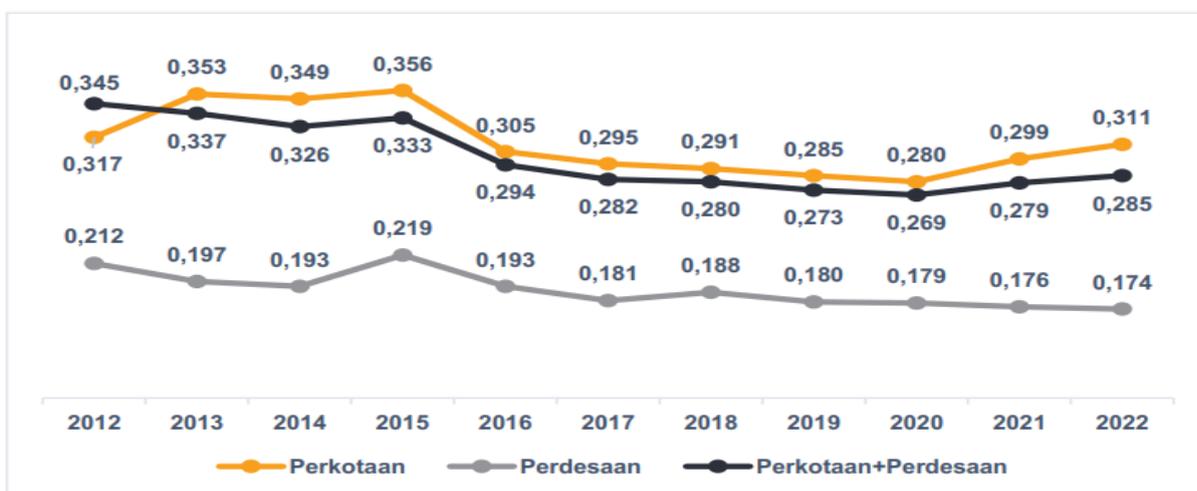
Secara umum, Indeks-L pada periode 2012-2022 cenderung mengalami penurunan, meskipun mengalami kenaikan di beberapa tahun. Jika dilihat menurut daerah, pola berbeda terlihat di perkotaan dan pedesaan. Pada periode 2015-2020, di perkotaan

cenderung mengalami penurunan dan meningkat lagi pada 2021-2022, sedangkan di perdesaan terus cenderung menurun dari tahun 2015-2022, meskipun pernah naik di tahun 2018.

Jika dilihat perkembangannya, ketimpangan pengeluaran di perkotaan pada periode 2012-2022 termasuk dalam kategori sedang. Sementara daerah pedesaan mulai pada periode 2012-2021 dikategorikan pada ketimpangan rendah. Jika dibandingkan menurut wilayah, pada periode 2012-2021, perkotaan memiliki ketimpangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Gambar 7.

Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2012-2022



Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Konsumsi Pengeluaran Tahun 2012-2022 (Kondisi Maret)

Gambar 8.

Indeks L di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2012-2022.



Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Konsumsi Pengeluaran Tahun 2012-2022 (Kondisi Maret)

Tabel 2.

Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia
Tahun 2013 – 2022.

Daerah/ Kelompok Penduduk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perkotaan										
40 % Terendah	15,40	15,62	15,83	15,91	16,04	16,47	16,93	16,94	16,81	17,07
40 % Menengah	34,83	34,88	34,60	36,74	36,89	36,93	37,09	36,94	36,03	35,01
20 % Teratas	49,77	49,50	49,57	47,35	47,07	46,60	45,98	46,13	47,16	47,93
Perdesaan										
40 % Terendah	21,03	20,94	20,42	20,40	20,36	20,15	20,59	20,62	20,68	21,01
40 % Menengah	37,96	38,40	37,53	38,50	39,65	39,59	39,67	39,61	39,58	38,91
20 % Teratas	41,00	40,65	42,05	41,10	39,99	40,26	39,74	39,77	39,74	40,08
Perkotaan + Perdesaan										
40 % Terendah	16,87	17,12	17,10	17,02	17,12	17,29	17,71	17,73	17,76	18,06
40 % Menengah	34,09	34,60	34,65	36,09	36,47	36,62	36,81	36,78	36,37	35,74
20 % Teratas	49,04	48,28	48,25	46,89	46,41	46,09	45,48	45,49	45,87	46,20

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Konsumsi Pengeluaran Tahun 2013-2022 (Kondisi Maret)

Benar, distribusi pendapatan adalah salah satu aspek yang penting dalam studi ekonomi. Pembahasan tentang distribusi pendapatan mengacu pada cara pembagian kekayaan dan pendapatan di antara individu, rumah tangga, atau kelompok dalam suatu masyarakat atau negara.

Dalam konteks distribusi pendapatan, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembagian kekayaan dan pendapatan. Faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen memiliki peran penting dalam menentukan distribusi pendapatan. Misalnya, kepemilikan tanah dan modal yang luas oleh kelompok tertentu dapat memberikan mereka keuntungan ekonomi yang lebih besar daripada mereka yang memiliki sumber daya tersebut dalam jumlah yang lebih kecil.

Selain faktor-faktor produksi, faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, keterampilan, struktur sosial, dan faktor historis juga dapat memengaruhi distribusi pendapatan. Misalnya, kebijakan pemerintah yang mengatur pajak, subsidi, atau kebijakan ketenagakerjaan dapat memiliki dampak signifikan pada distribusi pendapatan.

Pembahasan tentang distribusi pendapatan penting karena distribusi yang tidak adil

dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, distribusi pendapatan yang merata dapat membantu menciptakan stabilitas sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan menganalisis pola distribusinya, ekonom dapat mengidentifikasi ketidakadilan dalam pembagian kekayaan dan mencari solusi untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam realitasnya, distribusi merupakan tahap ekonomi yang melibatkan perpindahan hasil produksi dari satu pihak ke pihak lain setelah proses produksi selesai. Proses distribusi ini dilakukan melalui mekanisme pertukaran (mubadalah), baik dalam bentuk pertukaran langsung antara hasil produksi atau melalui penggunaan alat tukar seperti uang. Dalam konteks syari'at Islam, konsep distribusi ini diperinci dalam pembahasan mengenai al-'aqd (transaksi). Untuk memastikan distribusi yang memiliki signifikansi yang memadai, prinsip-prinsip distribusi dalam syariah Islam perlu diperhatikan dengan seksama seperti sebagai berikut:

1. Keadilan (Adil): Distribusi pendapatan harus dilakukan secara adil, dengan memperhatikan hak-hak individu dan kebutuhan masing-masing. Tidak boleh ada penyalahgunaan atau penindasan dalam proses distribusi.
2. Kesetaraan (Tasamuh): Setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bagian dari hasil produksi dan kekayaan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya.
3. Kepastian (Yaqin): Distribusi pendapatan harus dilakukan dengan jelas dan pasti. Setiap individu harus mengetahui hak-haknya dan memiliki kepastian bahwa hak-hak tersebut akan dihormati dan dilindungi.
4. Kebaikan umum (Maslahah 'Amah): Distribusi pendapatan harus mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan.
5. Larangan eksploitasi (Tadlis): Distribusi pendapatan tidak boleh melibatkan praktik-praktik eksploitasi atau penipuan. Tidak boleh ada pemerasan, manipulasi harga, atau praktik-praktik yang merugikan pihak lain dalam proses distribusi.
6. Solidaritas sosial (Takaful): Distribusi pendapatan harus mendorong solidaritas sosial dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ada tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu atau dalam kesulitan ekonomi.

7. Menghindari pemborosan (Israf): Dalam distribusi pendapatan, perlu dihindari pemborosan dan penggunaan yang tidak bijaksana. Setiap individu harus bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan dan sumber daya yang diberikan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendistribusian ekonomi di Indonesia masih tidak merata karena terjadi peningkatan kesenjangan kekayaan antara pemilik modal yang semakin kaya dan pekerja yang hanya mengandalkan modal tenaga dan keahlian mereka. Terdapat juga ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Tingginya tingkat pengangguran juga berkontribusi terhadap kemiskinan. Akar dari kemiskinan struktural ini adalah eksploitasi dan ketidakadilan.
2. Perspektif Islam tentang keadilan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Indonesia dapat direalisasikan melalui implementasi konsep distribusi ekonomi Islam secara komprehensif dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam Islam, pendistribusian ekonomi didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu kebebasan dan keadilan. Sayangnya, konsep distribusi yang bebas dan adil ini hanya sebagian kecil yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa contoh implementasi konsep distribusi tersebut termasuk pembentukan Badan Amil Zakat, pengembangan wakaf, dan penerapan hukum waris Islam. Namun, upaya penerapan konsep distribusi ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi Indonesia.

Saran

1. Disarankan agar pemerintah berupaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang memadai. Distribusi kekayaan merupakan isu yang sangat penting, kompleks, dan sulit. Menyelesaikannya dengan cara yang adil akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua anggota masyarakat. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan produksi dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat meningkat. Kekayaan tersebut tidak boleh hanya menjadi komoditas yang beredar terbatas di kalangan individu kaya saja.
2. Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip distribusi yang diatur berdasarkan ajaran agama dan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Partadiredja. 1992. Pengantar Ekonomika. Yogyakarta. BPFE.
- At-Tariqy Husein Abdullah Abdul, Al-Iqtishad Al-Islami, Ushuluhu wa Mubaun wa Ahdaf, Dar An-Nafais, (Kuwait, 1999).
- BPS. 2022. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022. BPS. Jakarta.
- Idri. 2015. Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Kecana. Jakarta.
- Lestari Agusalim.2016. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia. Artikel Publish Kinerja, Vol. 20 No. 1.
- Muhammad Qal'ah Jey, Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy, Dar An-Nafais, Kuwait.
- Nugroho, , I. dan Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES.
- Rahmat Taufik. 2011. Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Republika.2017.Ini Cara Pemerintah Wujudkan Pemerataan Ekonomi. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/17/oxz2bd415-ini-cara-pemerintah-wujudkan-pemerataan-ekonomi?>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023, pukul 10.40 WIT.
- Sri Mulyani, (Menteri Keuangan RI),Pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia Pengantar dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2019. Di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta,18 Mei 2018).
- Umer Chapra. 2007. Islam and The Economic Challenge diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press.